

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI UNTUK MENUMBUHKAN PARTISIPASI AKTIF WARGANEGARA DALAM ERA GLOBALISASI**

RATNANINGSIH  
Prodi PPKn Pascasarjana UNS Surakarta  
[ratnaningsih935@gmail.com](mailto:ratnaningsih935@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam era globalisasi. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi seharusnya tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai, dan ketrampilan kewarganegaraan akan tetapi bagian terpenting adalah mengaplikasikan pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut dalam situasi nyata yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara melalui pengembangan pembelajaran yang memasukkan pengalaman-pengalaman nyata berdasar perkembangan pribadi siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mampu mengubah paradigma pembelajaran dari yang bersifat *formatif* (indoktrinatif/pengajaran) menuju *constructive* dan *transformative* (integratif/pembelajaran) sesuai konteks sebagai bagian adanya pembaharuan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tersebut.

*Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Demokrasi, Partisipasi aktif*

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan berjalannya gerakan reformasi, bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai bidang kehidupan baik bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Khususnya dalam bidang politik bangsa Indonesia mengalami perubahan sistem politik menuju kearah sistem politik yang demokratis. Setiap warga negara mendambakan

pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Oleh karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.

Dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Hornby dkk, 1998) dikemukakan bahwa “*Democracy*” adalah :

“ (1) *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) Country with government which encourages and allows rights of citizens such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities; (3) Society in which there is treatment of each other by citizens as equals*”.

Dari kutipan tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara/masyarakat dimana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Demokrasi tidak dapat terlaksana secara alamiah tanpa didukung proses pendidikan untuk mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang demokratis untuk menegakkan dan mengembangkan demokrasi. Sejalan dengan pendapat Bahmuller & John J. Patrick dalam Fachri Adnan (2005) mengemukakan bahwa :

“ untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi, sekolah harus mendidik generasi muda (*Young Citizen*) memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni :

“demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan “*rule of law*”, demokrasi dengan pembagian

kekuasaan negara, demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial".

Dari pendapat Sanusi diatas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem kehidupan kenegaraan memiliki pilar atau prinsip yang menjadi ciri pemerintahan demokratis.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini cukup berat, karena bangsa Indonesia belum memiliki sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai, dan ketrampilan akan tetapi aplikasi dari pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut belum menunjukkan adanya partisipasi aktif warga negara. Secara konstitusional dan formal kurikuler sesungguhnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk " mencerdaskan kehidupan bangsa ", sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan dalam tatanan pendidikan nasional.

Menurut Naval, Print, dan Veldhis dalam Murray Print (2000:25)

*" Democratic Citizenship Education aims to develop students capability for thoughtful and responsible participation as democratic citizens in political, economic, social, and cultural life "*. Sejalan dengan pendapat diatas, Birzea dalam Murray Print (2000:25)

*" Education for Democratic Citizenship is the set of practices and activities aimed at making young people and adults better equipped to participate actively in democratic life by assuming and exercising their rights and responsibilities in society "*.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi merupakan pendidikan untuk meningkatkan pemberdayaan, tanggung jawab dan partisipasi aktif warga negara.

Namun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia dalam instrumentasi dan praksisnya yang begitu fluktuatif sesuai dengan irama dan iklim sosial politik terkait pada kebijakan politik kenegaraan pada setiap kurun kepemimpinan nasional, dimulai dari

kepemimpinan presiden Soekarno, presiden Soeharto, presiden Habibie, presiden Abdurrahman Wahid, presiden Megawati Soekarno Putri, presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini presiden Joko Widodo, ternyata masih dirasakan dan diamati dalam fenomena yang ada, belum memberikan implikasi perilaku nyata yang menggembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat kita amati dan rasakan bahwa sampai hari ini antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran HAM dimana-mana, komunikasi sosial politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas tata krama, terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara, dan begitu maraknya perilaku koruptif di berbagai sektor penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil penelitian dari Asia Foundation (*National Survey of Voter Education : 1998*) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi. Untuk itu sangat diperlukan paradigma baru pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang secara ideal, instrumental, dan praksis untuk memperkuat upaya internalisasi dan personalisasi nilai-nilai demokrasi.

Menurut Gandal dan Finn dalam Winataputra (2012) terutama di negara berkembang pendidikan demokrasi sering dianggap “ *...taken for granted or ignored* “, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Sesungguhnya, Gandal dan Finn menegaskan bahwa pendidikan demokrasi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan.

Sejalan dengan pendapat Winataputra (2002) bahwa belum berhasilnya pendidikan demokrasi di Indonesia secara mendasar karena belum dikembangkannya paradigma pendidikan demokrasi yang sistemik sehingga upaya pengembangan “*Civic Intelegence, Civic Participation and Civic Responsibility* “ melalui berbagai dimensi “*Civic Education*” sebagai wahana utama pendidikan demokrasi tidak bisa diwujudkan secara optimal.

Bertitik tolak dari pokok pikiran diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini ialah “ bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam era globalisasi?”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi dokumen, studi berbagai buku pustaka dan observasi. Pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber, analisis dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diterapkan di persekolahan. Apabila dilihat dari aspek istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) disebut juga dengan *Civic Education* dan *Citizenship Education*. Menurut Stanley B Diamon (Wahab. A.A, 2011:29), menjelaskan tentang pengertian *Civics* atau *Citizenship Education* dalam arti luas dan sempit dalam kaitannya dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Dalam arti sempit, *Civics* lebih menekankan pada teori dan praktek pemerintahan demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih diorientasikan pada *Citizenship Education* yang menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

Levine dalam Ryan (2018) mengemukakan bahwa “ *Civic Education is a discipline without a field with contributions coming from political, science, psychology, sociology, educational policy, and social studies education* “. Dengan kata lain bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah disiplin ilmu dengan kontribusi yang berasal dari ilmu

politik, psikologi, sosiologi, kebijakan pendidikan, dan pendidikan ilmu sosial. Implikasinya, karena Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bersifat interdisipliner, teori dan penelitian dalam bidang Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki perspektif yang saling melengkapi dan kontradiktif yang digunakan untuk memperkuat pemikiran dan praktek di lapangan.

Menurut John J. Cogan (1999) mengartikan *Civic Education* sebagai “ ... *the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives* “. Civic Education merupakan mapel dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Dalam definisi lain, David Kerr (1999) menyatakan *Citizenship Education* dalam arti luas sebagai :

“ *Process to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizen and in particular the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process* “.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai proses pendidikan dalam menyiapkan generasi muda akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan khususnya, peran pendidikan melalui persekolahan, pengajaran, dan pembelajaran dalam proses penyiapan tersebut. Penyiapan generasi muda yang menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara bagian dari sebuah institusi politik yaitu negara diwujudkan dalam bentuk partisipasi/keterlibatan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

Rusnaini (2015:367) merumuskan tentang pentingnya keterlibatan warga negara sebagai berikut :

“ *it is expected that with the understanding of citizenship statuses, the government will give its people a space to engage in the legislating process and public policy making so that the prospect of democracy and citizenship will be better secured* “. Dengan kata lain, perlunya pemahaman tentang status warga negara, sehingga negara akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan dan pembuatan kebijakan publik agar masa depan demokrasi dan kewarganegaraan menjadi lebih baik.

Nu'man Sumantri (2001) memberikan definisi :

“ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang kiranya cocok dengan Indonesia adalah sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 “.

Sejalan dengan pendapat diatas, maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu bidang kajian di sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam bagian pendahuluan bidang studi PKn Permendiknas No. 22 tahun 2006 :

“ Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara “. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. “ Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme “. (Winarno, 2014 : 21).

Kehidupan demokrasi akan tumbuh kuat tidak hanya oleh bentuk pemerintahan demokratis, tetapi juga didukung oleh kehidupan demokratis dalam diri warga negara. Kehidupan yang demokratis ini hanya bisa dilakukan melalui pendidikan yang mampu menanamkan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dalam diri setiap warga negara. Pendidikan akan pentingnya demokrasi ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (Winarno, 2014:22).

Selain mengemban misi sebagai pendidikan politik demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  
(Winarno, 2014:19)

Melihat maksud dan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diatas, maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*Civic Intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*Civic Responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*Civic Participation*). Tiga kompetensi warga negara ini sejalan pula dengan tiga komponen Pendidikan Kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*). (Branson, 1998).

Dari berbagai pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana pendidikan dan pengembangan warga negara demokratis dilingkup sekolah yang berintikan demokrasi politik dengan menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara khususnya warga negara muda agar kelak dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya sesuai peran dan tanggung jawabnya serta berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi permasalahan kewarganegaraan dalam interaksi dengan bangsa lain didunia. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat diinternalisasikan dan ditanamkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap diri warga negara sehingga diharapkan setiap warga negara mendukung, berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat demokratis. Singkatnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan alat yang digunakan untuk membangun dan mempertahankan demokrasi dan memiliki peranan yang penting khususnya di era globalisasi.

#### B. Tinjauan tentang Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab dalam membentuk masyarakat demokratis. Konsep

Pendidikan demokrasi juga diartikan sebagai pemahaman terhadap fungsi, nilai, dan isi demokrasi. Pendidikan demokrasi berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Massing (2002:161) mengartikan :

“ *Civic Education is a future requirement of democracy and can be only effective in a democratic system* “. Dari batasan tersebut dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah harapan masa depan dari demokrasi dan hanya dapat efektif dalam sebuah sistem yang demokratis.

Alexis de Toqueville (Branson:1999, Wahab, A.A, 2011:41) menyatakan bahwa “ setiap generasi baru adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional “. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk suatu masyarakat demokratis, perlu penyelenggaraan pendidikan demokrasi yang terus menerus (continuitas) dan berkesinambungan baik melalui lembaga persekolahan maupun lembaga masyarakat.

Dalam definisi lain, Henkenborg (284-288) mengemukakan :

“ *Students are, therefore, are able to experience democracy and politics through their own experiences and actions and understanding and, as a result, develop some abilities when it comes to understanding the notion of democracy* “. Dengan kata lain bahwa para siswa, oleh karena itu, dapat mengalami politik dan demokrasi melalui pemahaman dan tindakan serta pengalaman mereka sendiri dan, sebagai hasilnya, mengembangkan kemampuan bagi siswa untuk mulai memahami gagasan demokrasi.

Sejalan dengan pendapat diatas, Nu'man Soemantri (1993, Wahab .A.A, 2011:42) menegaskan bahwa pengorganisasian dan penyajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara psikologis dan ilmiah di dalam kelas sebagai “ laboratorium demokrasi “ untuk menumbuhkan “ *creative dialogue* “, sebagai ciri masyarakat demokrasi. Isi kurikulum dan strategi pembelajaran ditekankan :

“ *...for all levels of schools should be carefully selected and dynamically organized integratedly upon the bases of democratic ideals, values, norms, and moral; psychologically relevant to individual development, contextually relevant to various learning environment, and scientifically sound* “. (CICED, 1996A:6).

Implikasi dari semua prinsip tersebut adalah bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya dikembangkan secara sistemik (lintas jenjang, jalur,

dan bidang), dengan konsep dasar demokrasi yang komprehensif (utuh dan lengkap), dan dengan organisasi kurikulum yang berdiversifikasi merujuk kepada “ *life cycle* anak “ perkembangan kognitif, sosial moral, dan skills, serta lingkungan belajar setempat. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mencakup pendidikan demokrasi dan Hak Asasi manusia secara metodologis menuntut perbaikan dalam ketiga dimensinya, yakni dalam “ *curriculum content and instructional strategies: civic education classroom; and learning environment*”. (CICED, 1996A).

Menyimak kedua pandangan diatas, maka paradigma baru pengembangan pendidikan demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimasa yang akan datang hendaknya :

1. Memiliki landasan konsepsi secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan holistik;
2. Memiliki sandaran filosofis-ilmiah yang kokoh;
3. Terbebas dari pengaruh kepentingan politik sesaat dari rezim yang berkuasa;
4. Memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
5. Seimbang antara pengembangan nilai dan moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya;
6. Menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis-indoktrinatif, tetapi menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dan;
7. Terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya;
8. Mempersiapkan dan mengembangkan bahan-bahan yang diambil dari isu-isu global untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warga negara sebagai warga dunia (global). (Wahab A.A, 2011:45).

Dalam konteks global dan perspektif internasional diperoleh indikasi bahwa ternyata perkembangan pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan arus globalisasi dan demokratisasi yang memang menampakkan fenomena yang berkembang secara eksplosif di seluruh penjuru dunia (Winataputra:2001), program

pendidikan harus mampu mengakomodasikan semua kecenderungan dari proses globalisasi itu dalam rangka pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik.

Globalisasi sebagai fenomena alam yang multidimensi dan kompleks yang menuntut solusi kritis, Rusnaini (2015:637) mengemukakan :

*“ when students are exposed to several topics of global citizenship it is expected that they can better develop the skills and competencies needed to cope with various issues in the global era “*. Dengan kata lain ketika siswa diperkenalkan dengan topik-topik yang terkait dengan kewarganegaraan global diharapkan siswa memiliki kemampuan dan ketrampilan yang lebih baik yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam era global. Program pendidikan perlu diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan global

Kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seyogyanya dikembangkan sebagai :

*“ ... laboratory for democracy where the spirit and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teacher should collaboratively develop and share domestic climate where decision making process is required and learned “*. (CICED, 1999A:6).

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus menggantikan kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang bersifat dominatif/indoktrinatif (formatif) menjadi integratif (constructive) yang bersifat memberdayakan siswa.

*“ openness in classroom discussion is based on student’s perceptions of the atmosphere for expressing opinions in class during discussions of political and social issues, and involves student’s relations with peers in the school setting as well as with teachers (Schulz, et al., 2010)*

Dari kutipan tersebut tampak bahwa keterbukaan dalam diskusi kelas didasarkan pada persepsi siswa untuk mengekspresikan pendapat di kelas selama diskusi tentang isu-isu sosial dan politik serta melibatkan siswa dengan teman sebaya di lingkungan sekolah maupun dengan guru. Pentingnya iklim demokratis di kelas dalam rangka untuk mendorong pembelajaran prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Dengan kata lain, keterbukaan dalam diskusi kelas dan kebebasan berekspresi memiliki pengaruh potensial

yang penting dalam konteks pembelajaran Kewarganegaraan. (Mosher et al, 1994;..Pasek dkk, 2008)

The European Unions initiative merumuskan :

*“ ... Teachers traditionally convey the knowledge they possess to learners, who subsequently must show what they have learned. In this approach, teaching is largely proactive, whereas learning is largely reactive. The purpose of the process is essentially to convey content, and the core problem is to find the most effective teaching methods for doing so. Learners certainly participate in this process, but the extent of self-direction and co-determination they may bring to it is inevitably circumscribed “.* (Murray Print, 2000:47).

Guru tradisional menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki untuk peserta didik, yang kemudian harus menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Dalam pendekatan ini, mengajar sebagian besar proaktif, sedangkan belajar sebagian besar reaktif. Tujuan dari proses ini adalah pada dasarnya untuk menyampaikan konten, dan inti masalah adalah untuk menemukan metode pengajaran yang paling efektif untuk melakukannya. Peserta didik tentu berpartisipasi dalam proses ini, tetapi sejauh mana pengarahan diri sendiri dan kemauan menjadi penentu bagi mereka sendiri. Guru harus mendorong siswa untuk membentuk gagasan sendiri, untuk mengekspresikan pendapatnya, dan membahas berbagai masalah dengan orang-orang yang berbeda pendapat serta menggunkan beragam tinjauan masalah ketika menyajikannya dalam sebuah diskusi atau debat. Siswa tidak hanya mendiskusikan isu-isu atau masalah-masalah sosial dan politik, siswa harus dilibatkan dalam proses untuk mempersiapkan aturan dan prosedur bagi pelaksanaan diskusi atau debat tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasar pada temuan dan pembahasan di atas dapat dirumuskan simpulan, yakni :

1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana pendidikan dan pengembangan warga negara demokratis dilingkup sekolah yang berintikan demokrasi politik tidak hanya menekankan pada pengetahuan, nilai dan ketrampilan

akan tetapi yang terpenting adalah mengaplikasikan pengetahuan, nilai, dan ketrampilan tersebut dalam bentuk keterlibatan dan partisipasi warga negara khususnya warga negara muda agar kelak dewasa dapat berperan aktif di masyarakatnya sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam menanggapi permasalahan kewarganegaraan dalam interaksi dengan bangsa lain didunia. Ditemukan hal-hal sebagai berikut : a) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah ditekankan untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, b) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran untuk menanamkan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi bagi siswa secara terus menerus dan berkesinambungan agar memahami gagasan demokrasi, c) Pemahaman terhadap pentingnya status warga negara sebagai anggota suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan akan membawa demokrasi kearah yang lebih baik di masa depan, d) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan arus globalisasi dan demokratisasi, pendidikan harus mampu membangun konsep kewarganegaraan global.

2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi aktif warga negara akan berhasil dengan mengubah dan mengembangkan paradigma pembelajaran dari yang bersifat formatif (berdasar pengajaran) menuju pembelajaran yang bersifat konstruktif atau transformatif (berdasar pembelajaran ). Kelas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus memberi ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi, debat terkait masalah-masalah yang relevan dengan komunitas dimana mereka berada serta dikaitkan dengan konteks global sebagai jalan untuk membangun pemberdayaan pengalaman. Adanya iklim kondusif bagi diskusi, debat terkait permasalahan sosial yang relevan dengan komunitas dimana siswa berada akan menjadi variabel yang kuat dan konsisten bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial dimasa dewasa.

Berdasar simpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada para pemangku kebijakan pendidikan khususnya tim pengembang kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan direkomendasikan agar pengorganisasian substansi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

dikembangkan secara komprehensif dan berdiversifikasi sesuai perkembangan anak serta mencakup pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dalam pendidikan secara keseluruhan dengan perbaikan dalam ketiga dimensinya, yakni dalam substansi/materi kurikulum dan strategi pembelajaran yang menyangkut pembelajaran PKN di kelas dan lingkungan pembelajaran.

2. Kepada para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) agar : a) memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang status warga negara sebagai anggota suatu negara agar terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, b) memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kompetensi siswa tentang gagasan demokrasi melalui pemahaman, tindakan, dan pengalaman siswa sendiri, c) menciptakan lingkungan kelas yang mempromosikan aliran bebas ide dan perspektif yang diperlukan serta menghindari ruang kelas sebagai ruang yang dikendalikan .

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul Azis wahab., Sapriya.2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. ALFABETA, Bandung.

Murray Print., Dirk lange.2012. *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens*, Sense Publisher, Rotterdam.

Udin S Winataputra., 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan : Refleksi Historis Epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan*, Universitas Terbuka.

Winarno., 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian*, Bumi aksara, Jakarta.

### **Jurnal**

Fabio alivernini., Sara Manganeli.2011. *Is There a Relationship Between Openness in Classroom Discussion and Students Knowledge in Civic and Citizenship Education*, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, Page 3442.

Fernanda Noguiera., Antonio Moreira.2012. *A Framework for Civic Rducation Teacher's*

*Knowledge, Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol. 47, Page 1180.

M. Fachri Adnan., 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pada Era Demokratisasi*, DEMOKRASI, Vol. IV No. 1, Hal. 64.

Ozlem Becerik Yoldas.,2015. *Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People*, *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol. 174, Page 546.

Rusnaini.,2015. *Democracy and Local Autonomy Policy In Indonesia : A Particularist Perspective on Sociology Education*, UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015), Vol. 1, Page 367.

Rusnanini.,2016. *Global Issue of Citizenship and The Development of Civic Education for University Students In Indonesia*, Vol. 1, Page 637.

Ryan T. Knowles., Christopher H. Clark.2018. *How Common is The Common Good? Moving beyond Idealistic Notions of Deliberative Democracy in Education, Teaching and Teacher Education*, Vol. 71, Page 13.

### **Prosiding**

Udin S Winataputra, dkk.,2012. *Paradigma Baru Civic Education di Sekolah*, AP3KNI Wilayah Propinsi Jawa Tengah.